

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(Studi di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

RISKA NOVA SARI

C100 170 144

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(Studi di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

RISKA NOVA SARI

C 100170 144

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(Studi di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan)**

Oleh:

RISKA NOVA SARI
C.100.170.144

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada
Hari : Jumat
Tanggal : 12 Maret 2021

Dewan penguji

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. Dr. Kuswardani, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. Muchamad Iksan, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

Mengetahui,
Dewan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. H. Khudorrah Dimyati, S.H., M.Hum
NIR. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di atas maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.

Surakarta, 1 Mei 2021

Penulis



RISKA NOVA SARI

C100170 144

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(Studi di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan)**

Abstrak

Tujuan penulisan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui peraturan serta penerapan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik menurut KUHP, UU ITE dan juga menurut hukum pidana islam. Penelitian dilakukan di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis apdkualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peraturan hukum pidana terha pelaku pencemaran nama baik di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan merujuk pada dua peraturan hukum yaitu KUHP dan UU ITE. Penerapan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan masih sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP serta UU ITE namun jalannya berbeda dengan pasal yang mengaturnya. Karena, penerapan hukum bagi pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan, tertulis ataupun dengan nagambar baik yang dilakukan melalui *online* maupun *offline* kasusnya diselesaik terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan atau mediasi dengan keadilan *restorative* (*Restorative Justice*). Dan peraturan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik menurut hukum pidana islam berupa hukuman ta'zir

Kata kunci: *Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Peraturan Hukum, Penerapan Pidana, Peraturan Sanksi Pidana*

Abstract

The purpose of this study is so find out the determine the regulations and the naliapplication of crimes against perpetrators of defamation according to the Crim Code, the ITE Law and also according to Islamic criminal law. The research was conducted at the Banjarbaru Police, South Kalimantan. This study uses a onsiqualtitative analysis method. The results showed that: The criminal law regulat against the perpetrators of defamation in the Banjarbaru Police, South ETKalimantan, refer to two legal regulations, namely the Criminal Code and the I Law. The application of crimes against the perpetrators of defamation at the edtBanjarbaru Police, South Kalimantan is still in accordance with what is regula clesiin the Criminal Code and the ITE Law, but the course is different from the art nothat regulate it. Because, the application of law for perpetrators of defamati ine, lwhether done verbally, in writing or with pictures, whether done online or off the case is resolved first by familial or mediation with restorative justice torsa(*Restorative Justice*). And the rules of criminal sanctions against the perpetr of defamation according to Islamic criminal law are in the form of ta'zir punishment

Keywords: *Criminal Acts, Defamation, Legal Regulations, Criminal Application, Criminal Sanctions Regulations*

1. PENDAHULUAN

Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pada masa sekarang ini semakin berkembang dan merupakan fenomena yang sangat meresahkan bagi masyarakat. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang, ancaman pidananya ditunjukan pada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat diadili dan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan cara dan dalam keadaan seperti yang diuraikan dalam pasal yang mengaturnya. Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan salah satu perbuatan yang semakin banyak dilakukan seseorang dengan cara merusak nama baik orang lain. Banyaknya kasus pencemaran nama baik disebabkan banyak masyarakat yang tidak berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu ataupun menyampaikan dan menyebarluaskan suatu informasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat banyak yang belum memahami aturan hukum yang berlaku, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan.

Kemajuan teknologi yang semakin canggih tidak menyebabkan kejahatan semakin berkurang tapi justru sebaliknya. Jenis dan modus tindak pidana pencemaran nama baik pada masa sekarang ini terus meningkat karena kemajuan teknologi informasi. Namun, tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku pencemaran nama baik dengan teknologi informasi masih sangat rendah. Hal ini tentunya sangat meresahkan bagi masyarakat. Karena kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidaklah sedikit.¹ Delik pencemaran nama baik telah diubah menjadi delik aduan, yaitu untuk dapat dilakukan penuntutan perlu adanya pengaduan dari pihak yang diserang nama baiknya dan untuk dapat dituntut harus juga terdapat perbuatan yang dilarang. Hal ini diatur dalam Buku Kesatu Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan.

¹ Asrianto Zainal, "*Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*", Jurnal Al-'Adl, Vol. 9 No. 1, Januari, 2016, hal 59.

Pencemaran nama baik yang dilakukan tanpa melalui media elektronik atau internet dapat diselesaikan melalui hukum *privat* atau perdata.² Sementara itu, sanksi pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik atau internet diatur sendiri dalam Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (3). Penerapan sanksi hukum pidana yang disebutkan dalam undang-undang berupa pidana penjara dan pidana denda. Sementara itu, peraturan sanksi pidana menurut hukum pidana islam bagi pelaku pencemaran nama baik berupa sanksi yang tidak dirumuskan secara pasti dalam nash Alquran dan hadis, dimana prosedur pelaksanaan hukuman diserahkan atas kebijakan (*policy*) hakim atau penguasa.³

Perumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah antara lain: (1) bagaimana peraturan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik?; (2) bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik menurut KUHP, Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik?; (3) bagaimana peraturan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik menurut hukum pidana islam?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah (1) mengetahui peraturan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik, (2) mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik menurut KUHP, Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, (3) mengetahui

² Wawan Tunggul Alam, “*Menguji Efektivitas Sanksi Pidana Untuk Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam Kehidupan Nyata dan Dunia Maya*”, Jurnal Kawistara, Vol. 8 No. 1, April, 2018, hal 106.

³ Fuad Thohari, 2018, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, Yogyakarta: Deepublish, hal. 10.

peraturan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik menurut hukum pidana islam.

2. METODE

Metode yang digunakan penulis dalam mengerjakan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini melihat dari segi yuridis yaitu melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dan melihat dari data kasus pencemaran nama baik yang terdapat di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi terkait hukum pidana bagi pelaku pencemaran nama baik. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Dan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menggabungkan data yang ada berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dengan hasil wawancara yang diperoleh oleh penulis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Peraturan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik

Peraturan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan merujuk pada dua peraturan hukum yaitu KUHP Buku Kedua Bab XVI mengenai Penghinaan Pasal 310 ayat (1) tentang pencemaran atau penistaan lisan, Pasal 310 ayat (2) tentang pencemaran atau penistaan tertulis, serta Pasal 311 ayat (1) tentang fitnah dan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3) *jo* Pasal 45 ayat (3).

Penghinaan ataupun pencemaran nama baik melalui media elektronik atau internet yang di atur dalam UU ITE ialah muatan penghinaan atau pencemaran yang dilakukan dengan cara menista atau menghina nama baik seseorang melalui media sosial atau aplikasi seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, Youtube, TikTok, Instagram, Telegram, Line, Snapchat, Pinterest, dan lain-lain. Sementara itu, dalam KUHP mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang berupa tuduhan dengan cara menista atau menghina yang dapat dilakukan melalui lisan atau tulisan ataupun gambar yang dimaksud agar diketahui oleh orang banyak atau diketahui umum. Dimana tuduhan yang dilontarkan oleh pelaku terhadap seseorang yang diserang nama baiknya mengakibatkan rasa malu. Dan yang hanya bisa merasakan perasaan malu tersebut ialah seseorang yang dicemarkan nama baiknya dan bukanlah orang lain yang bisa merasakannya, sehingga Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (2) KUHP merupakan delik aduan karena yang mengadu ialah orang yang merasa bahwa nama baiknya telah dicemarkan dan tidak boleh orang lain yang mengadukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini yang dituduhkan bukanlah suatu perbuatan tindak pidana, cukup hanya perbuatan yang membuat rasa malu maka pelaku dapat dilaporkan telah melakukan perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik. Karena, yang paling terpenting unsur tuduhan lah yang harus ada dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Apabila tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai fitnah yang diatur tersendiri dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan berkas Laporan Polisi No: LP / 290 / VII / 2020 / KALSEL / RES BJB maka penyidik menindaklanjuti laporan tersebut untuk membuktikan apakah terlapor bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang dilaporkan. Maka penyidik tentu mempersiapkan unsur-unsur yang dijadikan pertimbangan bahwa terlapor melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP agar dapat dinyatakan terbukti melakukan

tindak pidana Pencemaran atau Penistaan Lisan maka harus terpenuhi unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja
- c. Maksudnya terang supaya diketahui umum
- d. Menyerang nama baik seseorang ataupun kehormatan
- e. Dengan menuduhkan suatu hal

Dalam Laporan Polisi Nomor: LP / 290 / VII / 2020 / KALSEL / RES BJB dinyatakan bahwa Maha Ranny Seftiana alias Rani juga melakukan tindak pidana Fitnah yang di KUHP diatur dalam Pasal 311 ayat (1) agar dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Fitnah maka harus terpenuhi unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kejahatan pencemaran lisan atau tulisan
- b. Adanya bukti untuk membuktikan kebenaran tuduhan
- c. Diperbolehkan membuktikan kebenarannya tapi ternyata tidak bisa membuktikan
- d. Tuduhan yang dilakukannya berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka dapat dinyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan menunjukkan pelaku dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Pencemaran atau Penistaan Lisan dan Fitnah karena telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP.

3.2 Penerapan Pidana terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik

Penerapan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan menurut keterangan Panit II Reskrim, Bapak Jaelani dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 19 Oktober 2020 mengatakan bahwa kasus tindak pidana

terhadap pelaku pencemaran nama baik di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan selama ini tidak ada yang naik ke tahap sidik. Karena untuk mengatasi permasalahan mengenai pencemaran nama baik di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan cara pertama yang dilakukan untuk menyelesaikannya ialah melalui cara perdamaian atau mediasi dengan keadilan *restorative* (*Restorative Justice*). Setelah selesai dilakukan mediasi atau perdamaian dan menghasilkan kesepakatan, hasilnya akan berupa surat perdamaian agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi dan pelaku meminta maaf maka perkara pidana tersebut selesai. Untuk kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik atau internet setelah tahap mediasi selesai maka pelaku akan diminta untuk membuat video permohonan maaf dan akan di *upload* di sosial media milik pelaku.⁴ Penyelesaian dengan tahap damai ataupun mediasi tersebut masih sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP serta UU ITE namun jalannya berbeda dengan pasal yang mengaturnya. Sebab delik pencemaran nama baik merupakan delik aduan dimana pengaduan tersebut dapat dicabut atau ditarik kembali.

Berdasarkan keterangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada penyidik Polri supaya kasus-kasus pelanggaran UU ITE, khususnya yang terkait pencemaran nama baik, fitnah ataupun penghinaan, bisa diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice* (keadilan restoratif). Yang kemudian, diterbitkan Surat Edaran No: SE / 2 / II / 2021, tanggal 19 Februari 2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif dalam proses hukum terhadap UU ITE. Bertalian dengan surat edaran tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menerbitkan Surat Telegram No: ST / 339 / II / RES.1.1.1/ 2021, tanggal 22 Februari 2021 tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana kejahatan siber Khususnya Ujaran Kebencian yang menggunakan UU ITE. Terdapat poin-poin dalam surat tersebut yang sebagai pedoman untuk penyidik

⁴ Jaelani, Panit II Reskrim di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, Senin, 19 Oktober 2020, Pukul 11:30 WITA.

Polri dalam menanggulangi perkara UU ITE yakni salah satunya menyebutkan tindak pidana yang bisa diselesaikan dengan *Restorative Justice* merupakan pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan yang diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3), Pasal 207, Pasal 310, serta Pasal 311 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa penerapan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP serta UU ITE. Karena, menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan, penerapan hukum bagi pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan, tertulis ataupun dengan gambar baik yang dilakukan melalui *online* maupun *offline* kasusnya diselesaikan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan atau melalui mediasi.⁵

Dalam kasus Pencemaran Nama Baik atau Fitnah di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan berdasarkan berkas Laporan Polisi No: LP / 290 / VII / 2020 / KALSEL / RES BJB, tanggal 22 Juli 2020 dengan rujukan Surat Perintah Penyidikan No: SP.Sidik / 115.a / X / Res.1.14 / 2020 / Reskrim, tanggal 15 Oktober 2020. Dinyatakan bahwa hasil dari penyidikan penanganan perkara yang dilaporkan oleh Alhamidi pada tanggal 22 Juli 2020 yang kemudian dilaksanakan gelar perkara menyimpulkan bahwa proses penanganan perkara Pencemaran Nama Baik atau Fitnah yang dilakukan oleh Maha Ranny Seftiana alias Rani dihentikan penyidikanya karena perkara diselesaikan dengan keadilan *restorative (Restorative Justice)*.

Restorative Justice dapat diartikan juga sebagai penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban. Dalam perihal ini korban juga dilibatkan di dalam proses dengan pelaku yang didorong untuk mempertanggung jawabkan tindakannya, dengan upaya perdamaian yang diselesaikan di luar pengadilan dengan iktikad serta tujuan agar kasus hukum yang terjadi akibat perbuatan tindak pidana

⁵ Aryansyah, Kasat Reskrim Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, Senin, 19 Oktober 2020, Pukul 11:45 WITA.

dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan serta kesepakatan diantara para pihak dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah di perbuat dengan cara meminta maaf.⁶

Berdasarkan penyidikan terhadap Maha Ranny Seftiana alias Rani dan keterangan para saksi serta hasil dari keterangan Alhamidi terhadap perkara yang disangkakan menyatakan telah terjadi kesalahpahaman yang mana Rani telah meminta maaf kepada Alhamidi, dan Alhamidi mengajukan pencabutan pengaduan yang dilakukan pada tanggal 24 Desember 2020. Hal ini disebabkan tindak pidana pencemaran nama baik merupakan tindak pidana dengan delik aduan dimana ada suatu pengaduan dari orang yang nama baiknya di rugikan dan pihak yang mengajukan pengaduan atau pelapor tersebut bisa menarik kembali pengaduannya. Kemudian berdasarkan gelar perkara pada tanggal 05 Januari 2021, dimana penyidik memberikan kepastian hukum dengan menghentikan penyidikan, sehingga dikeluarkannya surat ketetapan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang menyatakan bahwa menghentikan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP / 290 / VII / 2020 / KALSEL / RES BJB, tanggal 22 Juli 2020 dikarenakan perkara diselesaikan dengan keadilan *restorative* (*Restorative Justice*). Berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SP. Tap / 155 .e / I / Res.1.14 / 2021 / Reskrim.

3.3 Peraturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana islam, perbuatan yang membuat seseorang merasa direndahkan harkat serta martabatnya disebut perbuatan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang pastinya dilarang oleh syara'. Perbuatan pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan berbagai macam seperti, menfitnah, menuduh seseorang melakuakn zina, menghina, mencela serta sebagainya. Sebab,

⁶ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Al’Adl, Vol. 10 No. 2, Juli, 2018, hal. 174-178.

akibat dari perbuatan pencemaran nama baik menimbulkan kerugian ataupun bahaya untuk jiwa, akal, keturunan, serta membuat rasa malu bagi para korbannya. Di peraturan hukum Negara Republik Indonesia pencemaran nama baik ialah perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu baik secara lisan ataupun tulisan serta gambar yang dilakukan online maupun offline sebagaimana penjelasan dalam Pasal 310 serta Pasal 311 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Mengejek berarti menghina, melecehkan ataupun memandang rendah orang lain serta menunjukan keburukan serta kekurangan mereka. Ejekan ataupun hinaan dapat diungkapkan dengan perkataan maupun perbuatan serta dengan isyarat dan perilaku tubuh. Dampak penghinaan sangatlah besar pengaruhnya sebab bisa mencemarkan nama baik seseorang. Dalam Alquran serta hadis sebutan menghina mencaci, menjelekkkan nama orang lain dengan tanpa bukti memiliki konotasi yang sama dengan kata fitnah, hasad, ghibah, dan namimah.

Berdasarkan berkas Laporan Polisi Nomor: LP / 290 / VII / 2020 / KALSEL / RES BJB Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan, yang menyatakan bahwa Maha Ranny Seftiana alias Rani telah menuduh Alhamidi telah menerima uang sebanyak Rp. 35.000.000,- dan juga menuduh Alhamidi menyuruh mundur para nasabah yang dari ke Polisian yang mengapling tanah di PT. KSP. Setelah di klarifikasi ternyata semua itu tidak benar sehingga Rani dapat dikatakan melakukan perbuatan fitnah. Dimana kata-kata yang diucapkan Rani tersebut mengakibatkan Alhamidi dirugikan karena tidak dipercaya orang lain dan menjadi malu. Oleh sebab itu, Maha Ranny Seftiana alias Rani dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencemaran atau penistaan lisan dan fitnah karena telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Tetapi penerapan hukum yang diuraikan dalam Pasal 310 ayat (1) serta Pasal 311 ayat (1) KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE belum bisa dijadikan sebagai upaya pencegahan terhadap

perbuatan menista ataupun menghina. Karena, pada masa sekarang ini tindak pidana pencemaran nama baik semakin berkembang dan merupakan fenomena yang sangat meresahkan juga merugikan masyarakat. Seperti menuduh orang lain melakukan perbuatan buruk yang belum pasti kebenarannya. Ketentuan dalam hukum Islam, mengenai perbuatan menista atau menghina orang lain, serta membuka aib orang lain merupakan larangan. Dan dikategorikan dalam perbuatan yang menyebabkan pengaruh kurang baik yang dampaknya bisa merugikan orang yang nama baiknya dicemarkan sebab hukum islam sangat melindungi kehormatan tiap manusia.

Pada dasarnya dalam hukum pidana Islam tidak terdapat sanksi khusus yang terkait dengan pencemaran nama baik, oleh karena itu peraturan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik menurut hukum pidana islam berupa hukuman ta'zir. Yakni hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun hakim terhadap pelaku tindak pidana yang tidak disebutkan hukumannya secara tegas serta rinci dalam Alquran serta hadis ataupun hukuman yang tidak termasuk jarimah hudud, qisas serta diyat dan kafarat.

Ta'zir menurut bahasa ialah *ta'dib*, yang maksudnya memberi pelajaran tetapi tidak didetetapkan sanksinya. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man'u, yang maksudnya menolak ataupun menghindari. Sebaliknya penafsiran ta'zir menurut Al-Mawardi ialah hukuman pembelajaran atas dosa (tindak pidana) yang belum didetetapkan hukumannya oleh syara'. Ketentuan penjatuhan pidana dalam islam yakni orang tersebut mukallaf yang maksudnya ialah orang yang sanggup dibebani kewajiban atau sudah baligh dan berakal sehat.

Sehingga peraturan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik menurut hukum pidana islam yakni hukuman ta'zir. Baik yang dilakukan melalui offline ataupun online termasuk dalam ranah jarimah ta'zir bukan tercantum jarimah qisas atau hudud, karena di zaman rasulullah belum ditemui pemberitaan data lewat media elektronik atau internet. Oleh sebab itu, tidak terdapat satu ayat ataupun hadis juga yang

mengatakan secara eksplisit eksistensi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui offline ataupun online.⁷ Dasar hukum perbuatan tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana islam mengacu pada Alquran yang menetapkan balasan dari perbuatan jahat yang telah dilakukannya harus sebanding dengan perbuatan tersebut. Pembuktiannya dengan menghadirkan saksi baik secara langsung maupun tidak langsung serta dengan pengakuan pelaku sendiri.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. *Pertama*, peraturan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan mengenai penghinaan ataupun pencemaran nama baik diatur dalam dua peraturan hukum yaitu Pasal 310 serta Pasal 311 KUHP dimana perbuatannya dilakukan secara lisan serta tulisan dan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang dilakukannya perbuatan pencemaran nama baik melalui media elektronik ataupun internet.
- b. *Kedua*, penerapan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan masih sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP serta UU ITE namun jalannya berbeda dengan pasal yang mengaturnya. Sebab pihak kepolisian Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan memprioritaskan kasus pencemaran nama baik lebih baik diselesaikan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan atau melalui mediasi dengan keadilan *restorative (Restorative Justice)*.
- c. *Ketiga*, peraturan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik menurut hukum pidana islam yang dilakukan melalui *offline* ataupun *online* termasuk dalam ranah jarimah ta'zir yang hukumannya ditetapkan oleh pemerintah ataupun hakim terhadap pelaku tindak pidananya.

⁷ Nur Sa'idatul Ma'nunah, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam", Jurnal Al-Jinayah, No. 2 Vol. 3, Maret, 2018, hal. 423.

4.2 Saran

- a. *Pertama*, saran bagi kepolisian hendaknya pihak kepolisian memberikan pemelajaraan dan lebih meningkatkan pengarahan kepada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik agar tidak mengulangi perbuatannya lagi karena akan berdampak buruk pada masyarakat lain.
- b. *Kedua*, saran bagi masyarakat hendaknya masyarakat berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu maupun menyampaikan dan menyebarkan suatu informasi yang belum tentu kebenarannya, sebaiknya cari tahu terlebih dahulu kebenarannya agar sesuatu yang disampaikan bersifat positif bukanlah sebaliknya.
- c. *Ketiga*, saran bagi peneliti berikutnya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang khususnya dalam mengkaji suatu permasalahan yang berhubungan dengan pelaku pencemaran nama baik.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Bapak Jaelani S.Sos dan Ibu Sri Wahyuni yang senantiasa memberikan doa dan dukungan moril maupun materiil serta kasih sayang yang tidak ada habisnya, serta adik (Amel) tersayang yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kedua, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., atas bimbingan yang selama ini diberikan dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan terimakasih kepada teman-teman penulis yang selama ini banyak membantu dan senantiasa memberikan semangat serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Wawan Tunggul. 2018. "Menguji Efektivitas Sanksi Pidana Untuk Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam Kehidupan Nyata dan Dunia Maya". *Jurnal Kawistara*. Vol. 8 No. 1.
- Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. 2018. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Al'Adl*. Vol. 10 No. 2.
- Ma'nunah, Nur Sa'idatul. 2018. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Jinayah*. No. 2 Vol.3.
- Thohari, Fuad. 2018. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zainal, Asrianto. 2016. "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana". *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 9 No. 1.